

SKRIPSI



ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKSI ANARKIS PADA UNJUK RASA DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS)

OLEH :

ANITA KUMALA

B111 10 251

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKSI ANARKIS PADA UNJUK RASA
DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan**

NO. 1133/PID.B/2012/PN.MKS)

Disusun dan Diajukan Oleh

ANITA KUMALA

B111 10 251

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKSI ANARKIS PADA UNJUK RASA DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ANITA KUMALA
B 111 10 251

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 13 Februari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



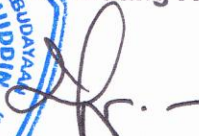
Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002



An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Anita Kumala

No. Induk : B 111 10 251

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pada
Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Studi Kasus
Putusan No.1133/Pid.B/2012/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 20 Januari 2014

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620111 198703 1 001

Pembimbing II



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANITA KUMALA

No. Pokok : B111 10 251

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Aksi Anarkis pada Unjuk Rasa di Kota Makassar
(Studi Kasus Putusan No.1133/Pid.B/2012/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NID. 10630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANITA KUMALA (B111 10 251), dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Anarkisme Pada Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No : 1133/Pid.B/2012/PN.Mks)” dibawah bimbingan Bapak H. M. Said Kari sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa dalam putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dan 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Anarkisme Pada Unjuk Rasa (Studi Kasus Putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Mks)**”.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku **Ayahanda Mahyudin Mahmud dan Ibunda Utamiati Amin** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.

Buat saudaraku **Djatri Utami Mahyudin, S.E., Maqfirah Dwi Utami, S.E., dan Atifah Mahyudin** atas bantuannya selama ini baik moral maupun materil. Kepada nenek, tante, om, sepupu-sepupu dan seluruh keluarga besar ku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang sangat membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H., Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H., Ibu Haeranah, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Anshory Ilyas, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan, dan Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Prof. Dr. Ir. Badriyah Rifai S.H., M.H selaku penasehat akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNHAS.
7. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya terkhusus untuk Kak Trie selaku staf Akademik angkatan 2010 yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian..
10. Fuad Try Khalas yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis selama kuliah sehingga dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga Besar Fuad terutama Ibunda Hj. Suryatri yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Sahabat Kuliah Genggong : Arin, Ela, Ulan, Tiwi, Dicit, Eka, Diti, Haifah, Mba Ayu, Nadya, Basri, Tita, Riska, Rifkah, Dea yang selama ini memberikan motivasi dan membantu selama perkuliahan ini.
13. Sahabat ku Nanda dan lin yang selalu memberikan semangat, keceriaan dan arti sebuah persahabatan serta selalu bersama penulis baik suka maupun duka.
14. Sahabat ku Widya Ramlah, Siti Huzaifah, Ayu Dini dan Winda yang selalu mendoakan penulis walau jarak yang memisahkan.
15. Keluarga Besar Bapak Usman Desa Bonde Kec. Campalagian yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata
16. Teman-teman KKN UNHAS Tahun 2013 Polman Kec. Campalagian Desa Bonde, Ayu, Uli, Aca, Meli, Anca, Kak Wanda, Kak Yanti, Kak

Anna dan Sadam atas bantuan dan kebersamaannya selama kuliah kerja Nyata.

17. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010 yang bergabung dalam "LEGITIMASI 2010".

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Amin

Makassar, 20 Januari 2014

Penulis

Anita Kumala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian :	11
1. Pengertian Unjuk Rasa.....	11
2. Pengertian Anarkisme.....	12
B. Tindak Pidana.....	15
1. Aliran Monisme.....	16
2. Aliran Dualisme.....	17
C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Barang Dengan Tenaga Bersama.....	19
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan....	22
1. Jenis dan Macam Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	26
2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosio- logis dalam Putusan Hakim.....	29
E. Bentuk-bentuk dan Tata Cara Penyampaian Di Muka Umum.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis & Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL &PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anarkisme Pada Unjuk Rasa.....	37
1. Identitas Terdakwa.....	37
2. Posisi Kasus.....	40
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	43
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	54
5. Amar Putusan.....	55
6. Komentar Penulis.....	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pada Aksi Unjuk Rasa.....	65
1. Pertimbangan Hakim.....	65
2. Amar Putusan.....	77
3. Komentar Penulis.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui, Hukum adalah kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat dan pelanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri¹.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* , Sinar Grafika, Yogyakarta 2010 hal. 116).

hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis².

Perlunya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.

Oleh karena itu, prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien, serta menjamin keadilan dan kebenarannya.

Perlu ditegaskan, bahwa kualifikasi terhadap perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Asumsi ini merupakan titik

² *Ibid* (hal. 132-133)

tolak yang penting, oleh karena apa yang dirumuskan sebagai perilaku melanggar hukum dibuat oleh warga-warga tertentu sebagai suatu takaran terhadap perilaku dari warga-warga lainnya. Kejahatan misalnya tidaklah inheren di dalam perilaku, akan tetapi merupakan suatu penilaian yang diberikan orang terhadap perilaku dari pihak-pihak lainnya. Maka semakin banyak dirumuskan tentang perilaku melanggar hukum merupakan suatu indikator bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan memang banyak terjadi kejahatan³.

Sebagai akibatnya, semakin banyak terjadi pertentangan antara bagian-bagian dari masyarakat semakin besar kecenderungan untuk merumuskan patokan-patokan tentang perilaku melanggar hukum. Akan tetapi perlu dicatat, bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menunjang perumusan tersebut, yaitu antara lain :

1. Perubahan-perubahan sosial.
2. Timbulnya kepentingan-kepentingan yang baru
3. Bertambahnya kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi
4. Berubahnya pandangan tentang konsepsi kepentingan umum.

Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum, senantiasa disertai dengan pembentukan organ-organ penekanannya. Akan tetapi apakah penegakannya tersebut akan berjalan secara efektif atau tidak, sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Harapan-harapan masyarakat ; yaitu apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

³ Soerjono Soekanto, *Fungsi hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1981 hal. 61

2. Adanya motivasi dari warga-warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut⁴. Lederach di dalam *Preparing for Peace Conflict Transformantion Across Culture* secara turut menjelaskan bagaimana konflik dalam perspektif konstruksi sosial. Ada tujuh asumsi yang dituliskannya yaitu⁵ :

1. Konflik sosial dipahami sebagai hal yang alamiah, suatu pengalaman-pengalaman umum yang hadir di setiap hubungan dan budaya.
2. Konflik dipahami sebagai kejadian konstruktif kebudayaan secara sosial. Konflik tidak hanya terjadi pada seseorang, tetapi orang, merupakan peserta aktif dalam menciptakan situasi dan interaksi yang mereka ambil pengalaman sebagai konflik.
3. Konflik muncul melalui proses interaktif yang melandaskan pada pencarian dan penciptaan makna bersama.
4. Proses interaksi disempurnakan melalui dan diakarkan dalam persepsi manusia, interpretasi, ekspresi, dan niatan-niatan, yang semuanya tumbuh dari dan berputar kembali ke kesadaran umum mereka (*common sense*)
5. Pemaknaan muncul sebagaimana manusia meletakkan diri mereka sendiri dan sesuatu yang sosial seperti situasi, kejadian, dan tindakan di dalam pengetahuan terkumpul mereka.
6. Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan skema-skema dan digunakan oleh sekelompok orang untuk

⁴ *Ibid* hal 62

⁵ Novri Susan. *Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik kontemporer*. Kencana Prenada, Jakarta, 2009. Hal. 67

merasakan, menafsirkan, mengekspresikan, dan merespons kenyataan sosial di sekitar mereka.

7. Pemahaman hubungan konflik sosial dan budaya tidak hanya satu pernyataan sensitif dari kesadaran, tetapi lebih jauh petualangan yang dalam dari penemuan dan penggalian arkeologis dari pengetahuan umum bersama dari sekelompok orang.

Sedangkan menurut Fisher tahapan dinamika konflik meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik.

- a. Pra konflik adalah periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
- b. Konfrontasi memperlihatkan satu tahapan pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak.
- c. Krisis adalah puncak konflik. Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari pihak terbunuh.
- d. Pasca konflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak.

Dinamika konflik adalah akibat dari dialektika kenyataan dan kekuasaan. Burton juga berpendapat bahwa keluhan (grievance) dari kelompok-kelompok kepentingan harus dibawa pada pelembagaan yang menyediakan ruang negosiasi untuk menemukan pemecahan masalah. Suatu konflik produktif sangat mungkin melahirkan suatu implikasi yang baik untuk semua pihak berkonflik dengan (1) mencegah bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi konflik dan (2) mengembangkan pemecahan masalah⁶.

Kekerasan mempunyai dimensi yang luas. Jika kita mengutip pendapat Galtung kekerasan bisa muncul dalam dimensi struktural dan langsung. Kekerasan struktural menghasilkan ketidakadilan yang diciptakan oleh struktur kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Kekerasan struktural menciptakan rasa tidak aman, melahirkan pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil, dan kematian akibat kelaparan pada saat wilayahnya kaya akan alam.

Aspirasi masyarakat terhadap ketidakadilan akibat kekerasan struktural yang menimpa mereka tidak direspon positif oleh pemerintah dengan struktur politik yang ada bahkan aparat keamanan melakukan tindakan represif. Tindakan represif dengan menekan secara psikologis dan fisik ini merupakan kekerasan langsung. Dampaknya adalah jatuh korban luka-luka maupun korban jiwa.

Kenyataan kekerasan tersebut mendorong masyarakat untuk berontak. Cara yang paling muda melawan kekerasan adalah melalui tindakan-tindakan anarkis, merusak fasilitas kantor,

⁶ *Ibid* hal. 132

pemblokiran jalan. Dalam hal itu terjadi runtuhnya kepercayaan terhadap negara.⁷

Frustasi rakyat terhadap beban persoalan mereka hadapi, baik kemiskinan, kerusakan tatanan sosial budaya, dan kerusakan lingkungan akan menjadi pendorong yang kuat bagi gerakan protes. Jika penyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak pada akar persoalan, yaitu menghapus kekerasan struktural, mobilisasi massa akan terus-menerus ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :

- a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
- b. Syarat Undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
- c. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non Retroaktif).
- d. Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, adil dan manusiawi.

Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya

⁷ Ibid hal 170-171

harus dijalankan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar.⁸

Maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri. Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul persoalan, sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan kebebasan warganya dalam mencapai haknya itu, dan sejauh mana pula kewajiban si pendukung hak asasi itu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan haknya, sesuai dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama⁹.

HAM adalah hak asasi manusia yang diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran serta kehadirannya dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin karena sifatnya yang asasi dan universal¹⁰.

Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Hal ini dapat di lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti:¹¹

⁸ Jimly Asshiddiqie *op.cit.* hlm. 84

⁹ Padmo Wahjono. *Beberapa Masalah Ketata Negara Di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta 1984 hal. 60

¹⁰ Syahril Syarbaini. *Sosiologi dan Politik*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 hal. 12

¹¹ Darwan prinst, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001, hal.8

1. Persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)).
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)).
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28).
4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (Pasal 28).
5. Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)).
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 31 ayat (1)).

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum Pasal 1 ayat (3) UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Demonstrasi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim orde baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa (Putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS) ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (Putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pada aksi unjuk rasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya hukum pidana yang terkait dengan perbuatan anarkisme di dalam unjuk rasa.
- b. Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus-kasus unjuk rasa yang berakhir anarkis.

1. Manfaat Praktis

Pembahasan ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a) Bagi Masyarakat Indonesia untuk memberi masukan dalam menyampaikan pendapat tanpa perbuatan yang anarki.
- b) Aparat hukum sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan masyarakat yang melakukan demonstrasi di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Unjuk Rasa dan Anarkisme :

1. Pengertian Unjuk Rasa/Demonstrasi

Di dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, "Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran".¹²

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.¹³

Sesuai dengan pengertian dari demonstrasi seperti terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

¹² pasal 1 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa di akses 2 oktober 2013 13:02 Wita

bahwa demonstrasi juga merupakan unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara. Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

Unjuk rasa atau Demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Ini artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Demokrasi adalah salah satu sarana demonstrasi. Artinya, demonstrasi harus berhenti ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan.

Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

2. Pengertian Anarkis

Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti “tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah archos yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Atau, seperti yang

dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan penguasa”

Meski kata-kata Yunani *anarchos* dan *anarchia* seringkali diartikan “tidak memiliki pemerintah” atau “ada tanpa pemerintah”, seperti yang dapat dilihat, arti orisinal anarkisme yang tepat bukanlah sekedar “tidak ada pemerintah”. “Anarki” berarti “tanpa suatu peraturan” atau lebih umum lagi, “tanpa kekuasaan”, dan dalam pemahaman inilah kaum anarkis terus menggunakan kata ini. Anarki berarti “bukannya tidak memerlukan tatanan, seperti yang dipikirkan pada umumnya, namun suatu ketiadaan peraturan”.¹⁴

Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.

Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

¹⁴ <http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/01/tentang-anarkisme-bagian-i-apa-itu.html>

Akses tgl 4 okt 2012

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.¹⁵

Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan kerusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Jadi, Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.

¹⁵Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia, Jakarta, 2002 hal.11

B. Tindak Pidana (Delik)

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaar feit*.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut.

1. Vos, Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang.
2. Van Hamel, Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain¹⁶.
3. Pompe memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari dua (2) segi, yaitu:

¹⁶ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 7-8

1. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁷.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁸

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua aliran tentang perbuatan pidana, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Untuk mengetahui bagaimana dua aliran tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan/tindak pidana.

1. Aliran Monisme

Aliran Monisme adalah suatu aliran yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Aliran ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal*

¹⁷ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal.182

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika aditama, Bandung, 2003. hal.59

responsibility). Dibawah ini beberapa batasan/pengertian tindak pidana dari para sarjana yang menganut aliran monisme.

1) D. Simons

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- (2) Diancam dengan pidana
- (3) Melawan hukum
- (4) Dilakukan dengan kesalahan
- (5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Dengan penjelasan tersebut maka disimpulkan, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

2) J. Bauman

Menurut J.Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Wiryono Prodjodikoro

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Aliran Dualisme

Berbeda dengan aliran dualisme yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, aliran

dualisme memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut aliran monisme dalam pengertian tindak pidana telah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualisme, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan seperti tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur :

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Dapat disimpulkan, bahwa dalam pengertian tentang tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Moeljatno juga menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak.

Apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau syarat penjatuhan pidana, kedua aliran diatas sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Dua aliran itu, baik aliran monisme maupun aliran dualisme, sama-sama mempersyaratkan, bahwa untuk adanya pidana harus ada perbuatan/tindak pidana

(*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability*).

Perbedaan dua aliran diatas adalah, bahwa dalam pandangan monisme keseluruhan syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*. Sementara dalam aliran dualisme keseluruhan syarat untuk adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup *criminal act* tidak mencakup *criminal responsibility*. Ada pemisahan antara perbuatan (pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu.

Secara teoritis adanya perbedaan dalam dua pandangan tersebut haruslah dicermati. Secara konseptual dua aliran ini sama-sama dapat diikuti dalam memberikan penjelasan tentang perbuatan pidana, tetapi apabila harus diikuti salah satu pandangan, maka juga harus diikuti dan dipahami secara konsisten. Apabila diikuti aliran monisme, maka harus dipahami, bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana, maka syarat untuk adanya pidana sudah dipenuhi. Sementara apabila diikuti aliran dualisme, dengan telah terjadinya tindak pidana tidak berarti syarat untuk adanya pidana sudah dipenuhi, sebab menurut aliran dualisme tindak pidana itu hanya menunjuk pada sifat perbuatan, yaitu sifat dilarangnya perbuatan, tidak mencakup kesalahan, padahal syarat untuk adanya pidana mutlak harus ada kesalahan.

Pemahaman terhadap dua aliran diatas sangat penting, terutama agar dipahami, bahwa batasan/pengertian tindak pidana tidak dibangun berdasarkan kerangka berpikir yang sama dari para ahli hukum. Sebagian ahli hukum bertolak dari kerangka berpikir

secara dualisme dalam memberikan batasan/pengertian tentang tindak pidana.¹⁹

C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Barang Dengan Tenaga Bersama

Bila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa : Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut :

- pengrusakan terhadap barang

¹⁹ Tongat. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Umm Press, Malang, 2009. Hal 105-109)

- penganiayaan terhadap hewan atau orang
- melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- membuang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:²⁰

1. Kejahatan pembunuhan
2. Kejahatan penganiayaan berat
3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan
4. Kejahatan perkosaan
5. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum

Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi :²¹

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku.

²⁰ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>
diakses 23 okt 2013 14:00 Wita

²¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor, 1995 hal.147

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Khusus untuk kekerasan terhadap barang, Pasal yang juga mengatur hal ini adalah pasal 406 KUHP ayat (1). Pasal 406 ini juga mengatur jika korban adalah binatang dalam ayat (2). Bunyi Pasal 406 yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan²².

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Peran utama kewenangan disidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan. Adanya wewenang dan tanggung jawab hakim tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas

²² Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

menegakkan hukum dan keadilan, dengan tidak membedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan putusan hakim yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu²³ :

1. Tahapan Menganalisis Perbuatan Pidana
2. Tahapan Menganalisis Tanggung Jawab Pidana
3. Tahapan Penentuan Pidanaan

Tugas dan fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara²⁴. Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar²⁵.

²³ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal. 94-100

²⁴ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁵ Pasal 68 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori Ratio Decidendi
6. Teori Kebijakan

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya²⁶.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 90

orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Rumusan suatu putusan sangat penting karena dari rumusan itu dapat diketahui dan dipahami jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang akan digunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro telah mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini, bahwa: “ sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun oleh hakim dan serapih-rapihnya oleh karena putusan hakim selain daripada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, juga mengenai hak asasi dari seorang terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya harus dilindungi oleh Badan-badan pemerintah“. Harus diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan kepada hal-hal terbukti peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan

itu dikenakan hukuman (elementen dan delik), maka tiap-tiap bagian harus ditinjau apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi²⁷.

1. Jenis dan Macam Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Ada dua jenis putusan dalam KUHAP, yaitu²⁸ :

1. Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan bila suatu perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya.
2. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan bila pemeriksaan suatu perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, dapat disimpulkan dua macam sifat putusan, yaitu:

1. Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan, ada dua macam yaitu:
 1. Putusan bebas dari segala dakwaan yaitu bila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu bila dalam persidangan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena dua alasan, yaitu; alasan pemaaf, bila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di luar kesadarannya,

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1986 hal 94-95

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986 hal. 277)

sehingga dimaafkan oleh hukum, yang diatur dalam pasal 44 KUHP, alasan pembenar yaitu bila tindak pidana yang dilakukan seseorang menyimpang dari ketentuan hukum akan tetapi berhubung perbuatannya dilakukan atas dasar keadaan memaksa, hal mana dapat dibenarkan oleh hakim (Pasal 49 KUHP) yaitu melakukan perbuatan pembelaan yang bersifat terpaksa terhadap diri, harta benda atau kehormatan karena ada serangan pihak lawan dan pembelaan melampaui batas pertahanan karena perasaan yang terguncang segera pada saat itu juga.

Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP dan apabila salah satu ketentuan dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi (kecuali huruf g dan i), maka putusan itu adalah putusan yang batal demi hukum (ayat (2)). Surat putusan pidana tersebut memuat²⁹:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh melalui pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar ketentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan, dan pasal peraturan perundang-

²⁹ Ahmad Rifai, *op.cit* hal.118

undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jaminannya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penutut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Sedang mengenai surat putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan sebagai berikut;

- a) Memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), kecuali:

- Huruf e

Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

- Huruf f

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- Huruf h

Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau dari segala hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c) Perintah supaya terdakwa dibebaskan jika ia ditahan.

Berdasarkan Pasal 195 KUHP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Jadi sahnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2)).
- b) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta

kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat³⁰.

E. Bentuk-bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dalam Undang-Undang No.9 tahun 1998 : ³¹

Pasal 9

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan :
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan atau
 - d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :
 - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. Instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
 - b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

³⁰ Ibid 126

³¹ Undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) memuat :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.

- (2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib :
- a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
 - c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
 - d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- (3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku

Pasal 14

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

- (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Bertempat di Pengadilan Negeri Makassar yaitu tepatnya pada kantor Pengadilan Negeri (PN) Sulawesi Selatan. Penulisan memilih instansi tersebut karena merupakan lembaga yang sangat berhubungan dan memudahkan penulisan.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dengan melakukan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan analisis yuridis terhadap anarkisme unjuk rasa di Pengadilan Negeri Makassar.

Sumber data dari penelitian ini diambil dari data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari informasi-informasi yang didapat dari majalah, koran, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³²

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dari penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature dan buku-buku serta data-data dari pengadilan Negeri Makassar tentang analisis yuridis terhadap anarkisme unjuk rasa di Kota Makassar.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu pengolahan data yang menghasilkan data deskriptif dan yang di nyatakan baik secara tertulis maupun lisan dan dari keseluruhan data yang diperoleh.

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, 2005, Surabaya. hal.141)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa di Kota Makassar (Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS)

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis hukum pidana dalam penanganan tindak pidana anarkis pada aksi unjuk rasa. Untuk memahami penerapan hukum terhadap hal tersebut, maka penulis dalam hal ini bersandar pada putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS.

1. Identitas Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HASRI ALIAS JACK
 Tempat Lahir : Enrekang
 Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 07 Juli 1990
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Alauddin 2 No.19, Kota Makassar
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa UIT (Universitas Indonesia Timur)

- II. Nama Lengkap : A. WIRADIANSYAH BIN
 ANDI RUDIANSYAH ALIAS DIAN
 Tempat Lahir : Bone
 Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Februari 1989
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Hertasning, Perumahan Kassi No. 128, Kota Makassar

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Mahasiswa |
- III.
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lengkap | : IKHSAN BIL NASHARI PATOPPOI |
| Tempat Lahir | : Sinjai |
| Umur/ Tanggal lahir | : 21 Tahun/ 10 Oktober 1991 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Asrama Lompobattang No.23A
Kel.Panam – bung Kec. Mariso
Kota Makassar |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa UIN Alauddin, Fak. Dakwa |
- IV.
- | | |
|---------------------|--|
| Nama Lengkap | : RAHMAT HIDAYAT AMAHORU |
| Tempat Lahir | : Negri Sepa |
| Umur/ Tanggal lahir | : 24 Tahun/ 05 Februari 1988 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Pampang I No. 2 Kel. Pampang
Kec. Panakukang, Kota Makassar ; |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
- V.
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lengkap | : BASRI BIN YAMIN ALIAS BOGEL |
| Tempat Lahir | : Salimbongan (Kab. Pinrang) |
| Umur/ Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 05 Juni 1990 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. BTN Pao-Pao Indah, Blok A I No.80,
Kota Makassar |

	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Mahasiswa
VI.	Nama Lengkap	: ANDI RIDWAN
	Tempat Lahir	: Sungai Nyamuk
	Umur/ Tanggal lahir	: 20 Tahun/ 18 April 1992
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl. Racing Center, Kota Makassar ;
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Mahasiswa
VII.	Nama Lengkap	: ABD. HAMID ALIAS BONDANG
	Tempat Lahir	: Bantaeng
	Umur/ Tanggal lahir	: 20 Tahun/ 01 Desember 1992
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl. Malengkeri Raya Blok A No. 20, Kota Makassar
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Mahasiswa UIN Alauddin, Fak. Dakwa dan Komunikasi
VIII.	Nama Lengkap	: ARMIN ALIAS MUNIR
	Tempat Lahir	: Pinrang
	Umur/ Tanggal lahir	: 21 Tahun/ 27 Agustus 1990
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl. Mamoa I No. 46, Kota Makassar
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Mahasiswa

2. Posisi Kasus :

Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12:00 Wita, bertempat di Kantor BPN Kota Makassar di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar. Terdakwa I. Hasri Alias Jack (selaku koordinator unjuk rasa) , II. Andi Wiradiansyah, III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, IV. Rahmat Hidayat Amahoru dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang para Terdakwa lakukan.

Awalnya Para Terdakwa bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya datang ke Kantor BPN Kota Makassar, dan saat berada ditempat tersebut Para Terdakwa serta para peserta demonstran lainnya kemudian melakukan orasi sehubungan dengan sengketa tanah antara H. Amirullah Pase melawan Willy Ingkriawan dan Suryanti Naim dan saat orasi dilakukan Terdakwa – I. Hasri Alias Jack kemudian mengambil Pot bunga yang ada di halaman kantor tersebut dan membantingnya yang mengakibatkan Pot Bunga tersebut menjadi pecah, dan oleh Terdakwa –I. Hasri Alias Jack pecahan Pot Bunga tersebut kemudian kembali digunakan oleh Terdakwa –I. Hasri Alias Jack untuk melempar kaca papan pengumuman yang berada didepan halaman kantor BPN Kota Makassar Terdakwa –I. Hasri Alias Jack selanjutnya kembali mengambil Tempat Sampah yang terbuat dari plastik dan melemparkannya ke kobaran api ban bekas yang dibakar oleh peserta demonstran, sementara itu Terdakwa –IV. Rahmat Hidayat pada saat itu juga mengambil tempat sampah yang terbuat dari kaleng yang berada didepan pintu kantor BPN dan selanjutnya dilemparkan masuk kedalam kobaran api yang masih menyala. Sedangkan Terdakwa –III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi mengambil Pecahan Pot Bunga dan melemparkannya ke kaca pengumuman yang mengakibatkan Kaca Pengumuman

tersebut pecah sedangkan Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah membakar tempat sampah yang terbuat dari plastik dan besi serta melempar Kaca Pengumuman juga dengan menggunakan pecahan pot bunga.

Kemudian para Terdakwa pada hari yang sama Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12:00 Wita, bertempat di Kantor PT.TUN di Jalan AP. Pettarani No. 45 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah dan Terdakwa – V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel dan Terdakwa – VI. Andi Ridwan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Para Terdakwa sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya datang ke Kantor PT.TUN Kota Makassar saat berada ditempat tersebut Para Terdakwa kemudian melakukan unjuk rasa dan saat sedang melakukan unjuk rasa tersebut Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah kemudian mengambil Asbak yang terbuat dari Kaca dan kemudian melemparkan Asbak tersebut ke lantai dan mengakibatkan Asbak tersebut menjadi pecah, dan lain melakukan hal tersebut Terdakwa, - II. Andi Wiradiansyah kemudian kembali melakukan orasi dengan cara berdiri diatas Kap Mesin mobil yang terparkir di Kantor tersebut sehingga mengakibatkan Kap Mesin mobil tersebut menjadi penyok, dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah juga sempat mendorong badan saksi Zainuddin Mangka, selanjutnya Terdakwa – IV. Andi Ridwan melakukan pengerusakan dengan cara melempar kaca jendela dengan menggunakan batu yang mengaitkan kaca tersebut pecah, sementara itu Terdakwa – V.

Basri Bin Yasmin memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu sedangkan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi melempar Kaca Jendela dengan menggunakan batu yang mengakibatkan Kaca tersebut pecah dan mengambil Pot Bunga dan membantingnya dimeja kaca ruang tamu yang mengakibatkan Kaca Meja tersebut pecah.

Kemudian terakhir pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Kantor DPRD Prop. Sulsel di Jalan Urip Sumihardjo No. 59 Kota Makassar dibawah pimpinan Terdakwa – I. Hasri Alias Jack (selaku koordinator lapangan), Terdakwa –II. A. Wiradiansyah, Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari bersama-sama dengan Terdakwa – VII. ABD. Hamid Alias Bondang serta Terdakwa - VIII. Armin tepatnya di ruangan aspirasi dan ruangan komisi A Kantor DPRD Provinsi Sulsel atau setidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili. Tujuannya untuk mempertanyakan kasus sengketa tanah antara Amiruddin Pase dengan Willy Ingkriawan dan Suryanti Naim yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.8 No.01 Kota Makassar.

Para Terdakwa dan beberapa peserta aksi unjuk rasa lainnya kemudian melakukan pembakaran ban bekas dan melakukan orasi serta meminta kepada saksi Marwah, SE yang merupakan staf Kantor DPRD Prop. Sulsel untuk dipertemukan dengan Anggota Dewan yang berasal dari komisi A dan atas permintaan tersebut, saksi Marwah,SE kemudian mempersilahkan kepada Para Terdakwa dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya untuk masuk kedalam ruangan aspirasi dan tidak berselang lama kemudian Lk. Imbar Ismail yang merupakan salah satu Anggota Dewan Prop. Sulsel datang menemui Para Terdakwa serta

beberapa peserta unjuk rasa lainnya sambil memperkenalkan diri selaku tim aspirasi dari komisi B dan mendengar hal tersebut, Terdakwa – I. Hasri Alias Jack tiba-tiba langsung naik kemeja lalu berteriak-teriak sambil mencari Anggota Komisi A selanjutnya menuju ke ruangan Komisi A bersama-sama dengan para terdakwa yang lainnya dan di dalam ruangan tersebut, Terdakwa – I. Hasri Alias Jack kemudian naik ke atas meja selanjutnya menendang kursi-kursi, sedangkan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nashari Patoppoi langsung menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya naik diatas meja dan menarik TV yang berada diatas meja hingga jatuh, sedangkan Terdakwa – VII. Abd. Hamid Alias Bondang menendang Kursi dan menghamburkannya lalu menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya mematahkan Michropon dan memecahkan papan nama yang berada diatas meja setelah itu naik keatas meja dan menendang Kaca lemari hingga pecah, sementara itu Terdakwa – VIII. Armin yang juga berada diruangan Komisi A kemudian melemparkan Kaca Lemari hingga pecah sedangkan Terdakwa – II. A. Wiradiansyah melempar kursi dan menendang Lemari hingga kacanya pecah dan mengambil Kaca Meja dan membuangnya kelantai hingga pecah.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa untuk menyatakan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*), atau tindak pidana (*delict*), maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum Dakwaan dalam surat dakwaan yang bersifat Kumulatif dan didalamnya terkandung dakwaan “Alternatif”, yakni

Dakwaan Pertama : (Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 pukul 12:00 Wita di Kantor BPN Kota Makassar)

Kesatu : Perbuatan Terdakwa I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 KUHPidana :

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

DAN

Dakwaan Kedua : (Pada hari Senin 14 Mei 2012 pukul 12:00 Wita di Kantor PT. TUN Kota Makassar)

Kesatu : Perbuatan Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, - V. Basri Bin Yasmin, – VI. Andi Ridwan, diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1)

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi , - V. Basri Bin Yasmin, – VI. Andi Ridwan, diduga melanggar ketentuan dalam

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke –
1 KUHPidana, Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

DAN

Dakwaan Ketiga : (Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 pukul
14:00 Wita di Kantor DPRD Prop. Sulsel)

Kesatu : Perbuatan Terdakwa I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II.
Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari
Patoppoi, - VII. ABD. Hamid Alis Bondang, - VIII. Armin
Alias Munir diduga melanggar ketentuan dalam Pasal
170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II.
Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari
Patoppoi, - VII. ABD. Hamid Alis Bondang, - VIII. Armin
Alias Munir, diduga melanggar ketentuan dalam Pasal
406 ayat (1) KUHPidana, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1
KUHPidana, Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan
Ketiga apa bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang
terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur
ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dari tiga Dakwaan
tersebut maka Dakwaan kesatu bersifat alternatif maka Dakwaan
kedua tidak dipertimbangkan lagi. Dimana pasal 170 ayat (1)
KUHPidana yang bagian inti delik (*delicts bestanddelen*), adalah
“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan
kekerasan terhadap barang”, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak”
3. Unsur “Dimuka umum atau terang-terangan”,
4. Unsur “Bersama-sama

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum tersebut dapat berupa “individu” (*naturelijk person*) atau “Badan hukum” (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa – I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa - V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa - VI. Andi Ridwan, Terdakwa - VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa - VIII. Armin Alias Munir adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban, dimana Para Terdakwa, ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik dan benar, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, bahwa merekalah Terdakwa - I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa - V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa - VI. Andi Ridwan, Terdakwa - VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa - VIII. Armin Alias Munir, sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termasuk dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak”:

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan dapat mengakibatkan barang menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini kekerasan yang dilakukan tersebut harus ditujukan kepada barang, baik itu kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dalam unsur ini diisyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi “Ahmad Bin Bance”, Saksi “Ayyub Heru Masnawan”, Saksi “Ambo Asse”, Saksi “Bripka Sangkala, SH”, Saksi “Aipda David Dao”, Saksi “Sainuddin Mangka”, Saksi “Hamka”, Saksi “Tajudding”, Saksi “Imran”, Saksi “Anang Tintus”, Saksi “Fither Hattu”, Saksi “Kisman”, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Hasri Alias Jack, Terdakwa Andi Wiradiansyah, Terdakwa Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa Andi Ridwan, Terdakwa Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa Armin Alias Munir serta barang bukti dan petunjuk maka dapat disimpulkan tentang fakta :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap diatas, dapat disimpulkan tentang fakta bahwa, benar

pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12:00 Wita, bertempat di Kantor BPN Kota Makassar di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar Terdakwa – I. Hasri Alias Jack telah mengambil pot bunga yang ada di halaman kantor tersebut dan membantingnya yang mengakibatkan pot bunga tersebut menjadi pecah, selanjutnya pecahan pot bunga tersebut diambil oleh Terdakwa – I. Hasri Alias Jack lalu digunakan untuk melempar kaca papan pengumuman yang berada di depan halaman kantor BPN Kota Makassar kemudian Terdakwa – I. Hasri Alias Jack mengambil tempat sampah yang terbuat dari plastik dan melemparkannya ke kobaran api yang masih menyala, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa – IV. Rahmat Hidayat Amahoru mengambil tempat sampah yang terbuat dari kaleng yang berada di depan pintu kantor BPN dan selanjutnya dilemparkan ke kobaran api yang masih menyala, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi mengambil pecahan pot bunga dan melemparkan ke kaca pengumuman yang mengakibatkan kaca pengumuman tersebut pecah, kemudian Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah membakar tempat sampah yang terbuat dari plastik dan besi serta melempar kaca pengumuman dengan menggunakan pecahan pot bunga tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa, pot bunga, kaca pengumuman serta tempat sampah menjadi rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi; Bahwa, benar setelah selesai melakukan aksi demonstrasi di kantor BPN Kota Makassar, selanjutnya para demonstran menuju ke Kantor Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara (PT. TUN) di Jalan AP. Pettarani No. 45 Kota Makassar , pada saat Para Terdakwa melakukan unjuk rasa dan saat itu - II. Andi Wiradiansyah kemudian mengambil asbak yang terbuat dari kaca dan kemudian melemparkan asbak tersebut ke lantai dan mengakibatkan asbak tersebut menjadi pecah, kemudian Terdakwa – II. Andi

Wiradiansyah kembali melakukan orasi dengan cara berdiri diatas kap mesin mobil yang terparkir di Kantor tersebut sehingga mengakibatkan Kap mesin mobil tersebut menjadi penyok dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah mendorong badan Saksi Zainuddin Mangka, selanjutnya Terdakwa – VI. Andi Ridwan melempar kaca jendela Kantor PT.TUN tersebut dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca jendela pecah, sementara itu Terdakwa – V. Basri Bin Yamin memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu, pada saat yang bersamaan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi melempar kaca jendela dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca tersebut pecah dan mengambil Pot bunga dan membantingkan di Meja Kaca ruang tamu yang mengakibatkan Kaca Meja tersebut pecah akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Asbak yang terbuat dari kaca, Kaca Jendela, Meja kaca serta Pot Bunga tidak dapat dipergunakan lagi; Bahwa, benar setelah selesai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT.TUN Makassar, selanjutnya pada pukul 14:00 Wita, para demonstran kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Propinsi Sulsel Jl. Urip Sumohardjo No. 59 Kota Makassar tepatnya diruangan aspirasi dan ruangan komisi A Kantor DPRD Propinsi Sulsel, pada saat para demonstran melakukan aksi unjuk rasa tersebut , dibawah pimpinan Terdakwa – I. Hasri Alias Jack selaku kordinator lapangan mempertanyakan kasus sengketa tanah antara Amiruddin Pase dengan Willy Ingkriawan dan Suryanti Naim yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.8 No. 01 Kota Makassar, para Terdakwa dan beberapa peserta aksi unjuk rasa lainnya kemudian melakukan pembakaran ban bekas dan melakukan orasi serta meminta kepada saksi Marwah, SE yang merupakan staf Kantor DPRD Prof. Sulsel untuk dipertemukan dengan Anggota Dewan yang berasal dari Komisi A dan atas permintaan tersebut, saksi

Marwah, SE kemudian mempersilahkan kepada Para Terdakwa dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya untuk masuk kedalam ruangan aspirasi, tidak berselang lama kemudian Imbar Ismail yang merupakan salah satu Anggota Dewan Prop. Sulsel datang menemui para terdakwa serta beberapa peserta unjuk rasa lainnya sambil memperkenalkan diri selaku tim aspirasi dari komisi B dan mendengar hal tersebut, Terdakwa – I. Hasri Alias Jack tiba-tiba langsung naik kemeja lalu berteriak-teriak sambil mencari Anggota Komisi A selanjutnya menuju ke ruang Komisi A bersama-sama dengan Para Terdakwa yang lain dan didalam ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa – I. Hasri Alias Jack kemudian naik keatas meja selanjutnya menendang kursi-kursi, pada saat itu juga Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi langsung menendang kursi, meja dan mengangkat kursi dan melemparkannya serta menendang kaca lemari hingga pecah dan selanjutnya naik diatas meja dan menarik TV yang berada diatas meja hingga jatuh, sedangkan Terdakwa –VII. Abd. Hamid Alias Bondang menendang kursi dan menghamburkannya lalu menendang kaca lemari hingga pecah dan selanjutnya mematahkan michropon dan memecahkan papan nama yang berada diatas meja setelah itu naik keatas meja dan menendang kaca lemari hingga pecah, sementara itu Terdakwa –VIII. Armin yang juga berada diruang Komisi A kemudian melempar kaca lemari hingga pecah, sedangkan Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah melempar kursi dan menendang lemari hingga kacanya pecah dan mengambil kaca meja dan membuangnya kelantai hingga pecah,maka Terdakwa – I. “Hasri Alias Jack”, Terdakwa II. “Andi Wiradiansyah”, Terdakwa III. “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa IV. “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa V. “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa VI. “Andi Ridwan”, Terdakwa VII. “Abd. Hamid Alias Bondang” , Terdakwa VIII. “Armin Alias Munir” telah melakukan kekerasan terhadap

barang milik BPN Kota Makassar, Kantor PT.TUN Makassar dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakibatkan barang-barang berupa : Pot Bunga, Kaca papan pengumuman, tempat sampah yang terbuat dari plastik, yang berada didepan halaman Kantor BPN Kota Makassar, kaca jendela pecah, Pot Bunga, kaca meja pecah milik Kantor PT.TUN Makassar, kursi-kursi, meja dan kaca lemari, TV yang berada diatas meja hingga jatuh, kaca lemari dan michropon serta papan nama yang berada diatas meja, kaca lemari hingga pecah, dan lemari hingga kacanya pecah dan kaca meja tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengganggu ketentraman masyarakat kota Makassar pada umumnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua), “ Melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak”, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa – I. “Hasri Alias Jack”, Terdakwa II. “Andi Wiradiansyah”, Terdakwa III. “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa IV. “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa V. “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa VI. “Andi Ridwan”, Terdakwa VII. “Abd. Hamid Alias Bondang” , Terdakwa VIII. “Armin Alias Munir”.

Ad. 3 Unsur “Dimuka umum atau terang-terangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan dimuka umum atau disebut juga dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu perbuatan melakukan kekerasan tersebut Para Terdakwa lakukan ditempat orang banyak (publik) dapat melihat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi “Ahmad Bin Bance”, Saksi “Ayyub Heru Masnawan”, Saksi “Ambo Asse”, Saksi

“Bripka Sangkala, SH”, Saksi “Aipda David Dao”, Saksi “Sainuddin Mangka”, Saksi “Hamka”, Saksi “Tajudding”, Saksi “Imran”, Saksi “Anang Tintus”, Saksi “Fithier Hattu”, Saksi “Kisman”, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Hasri Alias Jack, Terdakwa Andi Wiradiansyah, Terdakwa Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa Andi Ridwan, Terdakwa Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa Armin Alias Munir serta barang bukti, dan petunjuk maka dapat disimpulkan tentang fakta : bahwa, benar tempat dimana perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa adalah di dalam lingkungan Kantor BPN Kota Makassar di jalan AP. Pettarani Kota Makassar , Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) di jalan AP. Pettarani No. 45 Kota Makassar Kantor DPRD Propinsi Sulsel Jl. Urip Sumohardjo No. 59 Kota Makassar tepatnya diruangan aspirasi dan ruangan komisi A Kantor DPRD Propinsi Sulsel, tempat-tempat perbuatan kekerasan tersebut dilakukan (*locus delict*) adalah di tempat umum yaitu dimana orang banyak (publik) dapat melihat, dan perbuatan Terdakwa – I. “Hasri Alias Jack”, Terdakwa II. “Andi Wiradiansyah”, Terdakwa III. “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa IV. “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa V. “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa VI. “Andi Ridwan”, Terdakwa VII. “Abd. Hamid Alias Bondang” , Terdakwa VIII. “Armin Alias Munir”, tersebut telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat disekitar tempat kejadian khususnya, dan masyarakat Kota Makassar pada umumnya, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat di dikwalisir sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 (tiga) “Dimuka umum atau terang-terangan”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini adalah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi “Ahmad Bin Bance”, Saksi “Ayyub Heru Masnawan”, Saksi “Ambo Asse”, Saksi “Bripka Sangkala, SH”, Saksi “Aipda David Dao”, Saksi “Sainuddin Mangka”, Saksi “Hamka”, Saksi “Tajudding”, Saksi “Imran”, Saksi “Anang Tintus”, Saksi “Fithier Hattu”, Saksi “Kisman”, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa “Hasri Alias Jack”, Terdakwa “Andi Wiradiansyah”, Terdakwa “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa “Andi Ridwan”, Terdakwa “Abd. Hamid Alias Bondang” , Terdakwa “Armin Alias Munir” serta barang bukti dan petunjuk maka dapat disimpulkan tentang fakta :

Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang, dengan cara membanting pot bunga, melempar kaca jendela, membanting kaca meja, melempar kaca lemari dengan kursi, menendang kursi dan meja, perbuatan kekerasan terhadap barang-barang tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja dan dengan tenaga bersama mewujudkan delik, maka perbuatan Terdakwa – I. “Hasri Alias Jack”, Terdakwa –II. “Andi Wiradiansyah”, Terdakwa - III “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa – IV “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa - V “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa – VI “Andi Ridwan”, Terdakwa - VII “Abd. Hamid Alias Bondang” , Terdakwa –

VIII. “Armin Alias Munir”, dapat dipandang sebagai Pelaku-Peserta (medeplegen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 (empat), “Bersama-sama”, telah terpenuhi;

Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa – I. “Hasri Alias Jack”, Terdakwa – II. “Andi Wiradiansyah”, - III. Terdakwa “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa – IV. “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa – V. “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa. - VI “Andi Ridwan”, Terdakwa – VII. “Abd. Hamid Alias Bondang” , Terdakwa - VIII. “Armin Alias Munir” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Yang Dilakukan Secara Berlanjut”

4. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, mendengar keterangan saksi dan terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan juga mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada saat sidang dilaksanakan, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasri Alias Jack, II. Andi Wiradiansyah, III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, IV. Rahmat Hidayat Amahoru, V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, VI. Andi Ridwan, VII. Abd. Hamid Alias Bondang , VIII. Armin Alias

- Munir telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan Pertama kesatu, dakwaan kedua kesatu dan dakwaan ketiga kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama para terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar para terdakwa dilakukan penahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong pot bunga warna hijau yang telah pecah
 - 1 buah ban mobil bekas yang telah terbakar
 - 2 buah kaleng asbak/tempat sampah;
 - 4 bagian pecahan pot yang digunakan untuk melempar kaca;
 - 5 buah serpihan pecahan kaca bening;
 - 5 buah batu;
 - 3 buah pecahan kaca;
 - 3 buah besi jendela;
 - 3 buah karet penahan kaca jendela;
 - 3 buah pecahan kaca lemari warna bening;
 - 4 buah pecahan kaca dinding riben;
 - 3 buah pecahan kaca pintu riben yang dilapisi sticker bening;
 - 2 buah papan nama dari fiber warna coklat gelap dengan tulisan nama warna emas dalam keadaan rusak;
 - 2 buah microphone meja dalam keadaan rusak warna hitam;
 - 1 buah meja kayu warna coklat;
 - 1 buah pintu lemari warna cream;
 - 1 buah TV merk LG warna silver, dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

5. Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I. Hasri Alias Jack, Terdakwa II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa VI. Andi Ridwan,

Terdakwa VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa VIII. Armin Alias Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa - I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa - VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa - VIII. Armin Alias Munir tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari, sedangkan Terdakwa - VI. Andi Ridwan selama 1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 potong pot bunga warna hijau yang telah pecah 1 potong pot bunga warna hijau yang telah pecah, 1 buah ban mobil bekas yang telah terbakar, 2 buah kaleng asbak/tempat sampah, 4 bagian pecahan pot yang digunakan untuk melempar kaca, 5 buah serpihan pecahan kaca bening, 5 buah batu, 3 buah pecahan kaca, 3 buah besi jendela, 3 buah karet penahan kaca jendela, 3 buah pecahan kaca lemari warna bening, 4 buah pecahan kaca dinding riben, 3 buah pecahan kaca pintu riben yang dilapisi sticker bening, 2 buah papan nama dari fiber warna coklat gelap dengan tulisan nama warna emas dalam keadaan rusak, 2 buah microphone meja dalam keadaan rusak warna hitam, 1 buah meja kayu warna coklat, 1 buah pintu lemari warna cream, 1 buah TV merk LG warna silver, dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

6. Komentor Penulis

Rincian perbuatan masing-masing terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa :

(1) Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di Kantor BPN yang melakukan pengerusakan ialah :

- Terdakwa I. Hasri Alias Jack mengambil pot bunga yang ada di halaman kantor BPN dan membantingnya yang mengakibatkan pot bunga tersebut menjadi pecah, pecahan pot bunga tersebut diambil kembali lalu digunakan lagi untuk melempar kaca papan pengumuman yang berada didepan halaman kantor BPN, setelah itu tempat sampah yang terbuat dari plastik dan melemparkannya ke kobaran api ban bekas yang di bakar oleh peserta unjuk rasa.
- Terdakwa II. A. Wiradiansyah membakar tempat sampah yang terbuat dari plastik dan besi serta melempar kaca pengumuman dengan menggunakan pecahan pot bunga tersebut yang mengakibatkan perbuatan Para Terdakwa pot bunga, kaca pengumuman serta tempat sampah menjadi rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi.
- Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi mengambil pecahan pot bunga dan melemparkannya ke kaca pengumuman yang mengakibatkan kaca pengumuman tersebut pecah.

- Terdakwa IV. Rahmat Hidayat mengambil tempat sampah yang terbuat dari kaleng yang berada di depan pintu Kantor BPN dan selanjutnya dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala.

(2) Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di Kantor PT. TUN yang melakukan pengrusakan ialah :

- Terdakwa II. Andi Wiradiansyah mengambil Asbak yang terbuat dari Kaca dan kemudian melemparkan Asbak tersebut ke lantai dan mengakibatkan Asbak tersebut menjadi pecah, kemudian kembali melakukan orasi dengan cara berdiri diatas Kap Mesin mobil yang terparkir di Kantor tersebut sehingga mengakibatkan Kap Mesin mobil tersebut menjadi penyok, dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah juga sempat mendorong badan saksi Zainuddin Mangka.
- Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi melempar Kaca Jendela dengan menggunakan batu yang mengakibatkan Kaca tersebut pecah dan mengambil Pot Bunga dan membantingnya dimeja kaca ruang tamu yang mengakibatkan Kaca Meja tersebut pecah.
- Terdakwa V. Basri Bin Yasmin memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu.
- Terdakwa VI. Andi Ridwan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca jendela dengan menggunakan batu yang mengaitkan kaca tersebut pecah.

(3) Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Kantor DPRD Prov. Sulsel yang melakukan pengerusakan ialah :

- Terdakwa I. Hasri Alias Jack naik ke atas meja selanjutnya menendang kursi-kursi.
- Terdakwa II. Andi Wiradiansyah melempar kursi dan menendang Lemari hingga kacanya pecah dan mengambil Kaca Meja dan membuangnya kelantai hingga pecah.
- Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi langsung menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya naik diatas meja dan menarik TV yang berada diatas meja hingga jatuh.
- Terdakwa – VII. Abd. Hamid Alias Bondang menendang Kursi dan menghamburkannya lalu menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya mematahkan Michropon dan memecahkan papan nama yang berada diruangan Komisi A kemudian melemparkan Kaca Lemari hingga pecah.
- Terdakwa – VIII. Armin yang juga berada diruangan komisi a kemudian melempar kaca lemari hingga pecah.

Dari rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan di atas, Terdakwa - I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa - V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa - VI. Andi Ridwan, Terdakwa - VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa - VIII. Armin Alias Munir dapat dikatakan melakukan perbuatan berlanjut karena para Terdakwa melakukan perbuatan yang sama atau berulang-ulang di Kantor BPN, Kantor PT.TUN dan Kantor DPRD Prov. Sulsel dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan yaitu adanya

kesepakatan atau niat untuk bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang ada di kantor tersebut dan tenggang waktu antara perbuatan para Terdakwa di ketiga kantor tersebut tidak terlalu lama. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja ialah yang terberat.

Berdasarkan putusan perkara No: 1133/Pid.B/2012/PN.Mks, menyatakan bahwa Terdakwa - I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa - V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa - VI. Andi Ridwan, Terdakwa - VII. Abd. Hamid Alias Bondang, Terdakwa - VIII. Armin Alias Munir terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Berikut merupakan bunyi Pasal 170 Ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Penjelasan dari pasal ini yaitu :

- Tidak mensyaratkan unsur *schuld*
Pada diri mereka dinilai terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau oleh teriakan-teriakan massa, hingga cara berpikir mereka itu sebenarnya tidak otonom lagi.
- Kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau *openlijk geweld*.
Yang dimaksud secara terbuka adalah kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama terhadap orang (badan) atau

barang ditempat yang terbuka (ruang publik/tempat umum) sehingga mendatangkan gangguan ketertiban umum.

- Dilakukan secara bersama-sama / tenaga yang dipersatukan (*met verenigde krachten*).

Pasal ini dalam ilmu hukum pidana juga disebut sebagai *Land Friedensbruch* yakni sebagai tindak pidana melanggar ketertiban umum (*openbare orde*), berupa keturutsertaan dalam Huru-huru (massa) yang dilakukan secara terbuka oleh sejumlah orang/ penggunaan dari kekerasan orang banyak (*tempoi public ef flagrant de violence*).

- Melakukan kekerasan (*geweld plegen*) terhadap orang-orang atau barang-barang (*tegen personen of goederen*).

Dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) objek dari tindakan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana yang ditujukan terhadap orang atau benda tertentu melainkan merupakan suatu tindak pidana yang ditujukan terhadap orang-orang atau terhadap barang-barang.

Berbeda dengan pasal 406 ayat 1 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

Unsur Subyektif :

1) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

- a. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja.

- b. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- c. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.

Unsur Obyektif :

- 1) Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
- 2) Suatu benda
- 3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Secara melawan hukum (*wederrechtlijk*)

Berdasarkan penjelasan kedua Pasal tersebut Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 ayat (1) sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama di muka umum dalam waktu yang tidak terlalu lama ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 ayat (1) adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka dan tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka dan pelakunya tersebut dapat berupa individu.

Ancaman hukuman Pasal 170 ayat (1) ini lebih berat daripada Pasal 406 ayat (1). Apabila kita bandingkan pada akibat

yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 (1) lebih berat daripada Pasal 406 ayat (1). Pada Pasal 170 ayat (1), tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) dengan akibat yang sama, yaitu kekerasan terhadap barang, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Ada pun pada dakwaan kedua yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena agar dalam dakwaan dapat melengkapi dari perkara tersebut agar unsur bersama-sama juga dapat terpenuhi.

Hal ini juga diungkapkan oleh Hakim Nathan Lambe pada wawancara tanggal 1 oktober 2013 beliau berpendapat bahwa :

Dilihat dari kejadian yang terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa Pasal 170 ayat (1) lebih kuat ancaman pidananya dibandingkan Pasal 406 karena Pasal 406 ayat 1 hanya di pidana dua tahun delapan bulan dan dipasal tersebut tidak ada aturan yang dilakukannya kekerasan terhadap barang tersebut di dalam atau di luar ruangan yang dapat dilihat oleh publik, sedangkan Pasal 170 ayat (1) diterangkan bahwa perbuatan seseorang dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat langsung oleh publik dan dipidana lima tahun enam bulan. Jadi pasal 170 ayat (1) yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yang dilakukan di muka umum.

Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dengan mendasarkan pada pasal-pasal KUHP, yaitu : Kesatu,

melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. 55 ayat (1) KUHP.

Adapun alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan tersebut, berupa :

1. Keterangan saksi dibawah sumpah

Dipersidangan telah terdengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi – 1. Ahmad Bin Bance, Saksi – 2. “Ayyub Heru Masnawan”, Saksi – 3. “Ambo Asse”, Saksi – 4. “Bripka Sangkala, SH”, Saksi – 5. “Aipda David Dao”, Saksi – 6. “Sainuddin Mangka”, Saksi – 7. “Hamka”, Saksi – 8. “Tajudding”, Saksi – 9. “Syahril”, Saksi – 10. “Imran”, Saksi – 11. “Anang Tintus”, Saksi – 12. “Fithier Hattu”, Saksi – 13. “Kisman”. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keretangannya telah mengucapkan sumpah dan berjanji menurut agama Islam dan Kristen dan keterangan para saksi diberikan di sidang secara bebas tanpa paksaan atau tekanan dan bukan merupakan pertanyaan yang menjerat serta merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

2. Keterangan Terdakwa :

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa – I. “Hasri Alias Jack”, Terdakwa – II. “Andi Wiradiansyah”, - III. Terdakwa “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa – IV. “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa – V. “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa. - VI “Andi Ridwan”, Terdakwa – VII. “Abd. Hamid Alias Bondang” , Terdakwa - VIII. “Armin Alias Munir” dan keterangannya tersebut pada beberapa bagian pokok bersesuaian dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya di depan pengadilan di bawah

Sumpah dan mengenai terjadinya pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas di Kantor BPN, di Kantor PT.TUN, di Kantor DPRD Prop. Sulsel.

3. Barang bukti yang telah di ajukan di persidangan berupa:

1 potong pot bunga warna hijau yang telah pecah, 1 buah ban mobil bekas yang telah terbakar, 2 buah kaleng asbak/tempat sampah, 4 bagian pecahan pot yang digunakan untuk melempar kaca, 5 buah serpihan pecahan kaca bening, 5 buah batu, 3 buah pecahan kaca, 3 buah besi jendela, 3 buah karet penahan kaca jedela, 3 buah pecahan kaca lemari warna bening, 4 buah pecahan kaca dinding riben, 3 buah pecahan kaca pintu riben yang dilapisi sticker bening, 2 buah papan nama dari fiber warna coklat gelap dengan tulisan nama warna emas dalam keadaan rusak, 2 buah microphone meja dalam keadaan rusak warna hitam, 1 buah meja kayu warna coklat, 1 buah pintu lemari warna cream, 1 buah TV merk LG warna silver, dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap Delik Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan No: 1133/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pada Aksi Unjuk Rasa (Putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Mks)

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur- unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dapat dikatakan pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1133/Pid.B/2012/PN.Mks, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 96/ MKS/ Ep.1/ 07/2012, tertanggal 04 Juli 2012, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. Hasri Alis Jack dan Terdakwa II. Andi Wiradiansyah dan Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi dan Terdakwa IV. Rahmat Hidayat Amahoru, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12:00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Kantor BPN Kota Makassar di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Para Terdakwa bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya datang ke Kantor BPN Kota Makassar, dan saat berada ditempat tersebut Para Terdakwa serta para peserta demonstran lainnya kemudian melakukan orasi sehubungan dengan sengketa tanag antara H. Amirullah Pase melawan Willy Ingkriawan dan Suryanti Naim dan saat orasi dilakukan Terdakwa –I. Hasri Alis Jack kemudian mengambil Pot bunga yang ada dihalaman kantor tersebut dan membantingnya yang mengakibatkan Pot Bunga tersebut menjadi pecah, dan oleh Terdakwa –I. Hasri Alis Jack pecahan Pot Bunga tersebut kemudian kembali digunakan oleh Terdakwa –I. H Hasri Alis Jack untuk melempar kaca papan pengumuman yang berada didepan halaman kantor BPN Kota Makassar Terdakwa –I. Hasri Alis Jack selanjutnya kembali mengambil Tempat Sampah yang terbuat dari plastik dan melemparkannya ke kobaran api ban bekas yang dibakar oleh peserta demonstran, sementara itu Terdakwa –IV. Rahmat Hidayat pada saat itu juga mengambil tempat sampah yang terbuat dari kaleng yang berada didepan pintu kantor BPN dan selanjutnya dilemparkan masuk kedalam kobaran api yang masih menyala. Sedangkan Terdakwa –III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi mengambil Pecahan Pot Bunga dan melemparkannya ke kaca pengumuman yang mengakibatkan Kaca Pengumuman tersebut pecah sedangkan Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah membakar tempat sampah yang terbuat dari plastik dan besi serta

melempar Kaca Pengumuman juga dengan menggunakan pecahan pot bunga.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Pot Bunga, Kaca Pengumuman serta Tempat Sampah menjadi rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP,JO.Pasal 64 KUHPidana;

.....ATAU.....

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. Hasri Alis Jack dan Terdakwa II. II. Andi Wiradiansyah dan Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi dan Terdakwa IV. Rahmat Hidayat Amahoru, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 12:00 wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Kantor BPN Kota Makassar di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar atau setidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Para Terdakwa bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya datang ke Kantor BPN Kota Makassar, dan saat berada ditempat tersebut Para Terdakwa serta para peserta demonstran lainnya kemudian melakukan orasi sehubungan dengan sengketa tanag antara H. Amirullah Pase melawan Willy Ingkriawan dan Suryanti Naim dan saat orasi dilakukan Terdakwa –I. Hasri Alias Jack kemudian mengambil Pot bunga yang ada di halaman kantor tersebut dan membantingnya yang mengakibatkan Pot Bunga tersebut menjadi pecah, dan oleh Terdakwa –I. Hasri Alias Jack pecahan Pot Bunga tersebut kemudian kembali digunakan oleh Terdakwa –I. Hasri Alias Jack untuk melempar kaca papan pengumuman yang berada didepan halaman kantor BPN Kota Makassar Terdakwa –I. Hasri Alias Jack selanjutnya kembali mengambil Tempat Sampah yang terbuat dari plastik dan melemparkannya ke kobaran api ban bekas yang dibakar oleh peserta demonstran, sementara itu Terdakwa –IV. Rahmat Hidayat pada saat itu juga mengambil tempat sampah yang terbuat dari kaleng yang berada didepan pintu kantor BPN dan selanjutnya dilemparkan masuk kedalam kobaran api yang masih menyala. Sedangkan Terdakwa –III. Ikhsan Bin Nazhari

Patoppoi mengambil Pecahan Pot Bunga dan melemparkannya ke kaca pengumuman yang mengakibatkan Kaca Pengumuman tersebut pecah sedangkan Terdakwa – II. Andil Wiradiansyah membakar tempat sampah yang terbuat dari plastik dan besi serta melempar Kaca Pengumuman juga dengan menggunakan pecahan pot bunga.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Pot Bunga, Kaca Pengumuman serta Tempat Sampah menjadi rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHP,JO.Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

.....DAN.....

Khusus untuk Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah Bin Andi Rudiansyah dan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi ;

DAKWAAN KEDUA :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah Bin Andi Rudiansyah dan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi serta Terdakwa – V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel dan Terdakwa – VI. Andi Ridwan, pada hari Senin tanggal 04 mei 2012 sekitar pukul 12:00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jalann AP. Pettarani No. 45 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa , awalnya Para Terdakwa bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya datang ke Kantor PT.TUN Kota Makassar yang terletak pada tempat sebagaimana tersebut

diatas, dan saat berada ditempat tersebut Para Terdakwa kemudian melakukan unjuk rasa dan saat sedang melakukan unjuk rasa tersebut Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah kemudian mengambil Asbak yang terbuat dari Kaca dan kemudian melemparkan Asbak tersebut ke lantai dan mengakibatkan Asbak tersebut menjadi pecah, dan lain melakukan hal tersebut Terdakwa, - II. Andi Wiradiansyah kemudian kembali melakukan orasi dengan cara berdiri diatas Kap Mesin mobil yang terparkir di Kantor tersebut sehingga mengakibatkan Kap Mesin mobil tersebut menjadi penyok, dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah juga sempat mendorong badan saksi Zainuddin Mangka, selanjutnya Terdakwa – IV. Andi Ridwan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca jendela dengan menggunakan batu yang mengaitkan kaca tersebut pecah, sementara itu Terdakwa – V. Basri Bin Yasmin memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu sedangkan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi melempar Kaca Jendela dengan menggunakan batu yang mengakibatkan Kaca tersebut pecah dan mengambil Pot Bunga dan membantingnya dimeja kaca ruang tamu yang mengakibatkan Kaca Meja tersebut pecah ;

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Asbak yang terbuat dari Kaca, Kaca Jendela, Meja Kaca serta Pot Bunga tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP;

.....ATAU.....

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah Bin Andi Rudiansyah dan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi serta Terdakwa – V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel dan Terdakwa – VI. Andi Ridwan, pada hari Senin tanggal 04 mei 2012 sekitar pukul 12:00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jalann AP. Pettarani No. 45 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa , awalnya Para Terdakwa bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya datang ke Kantor PT.TUN Kota Makassar yang terletak pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dan saat berada ditempat tersebut Para Terdakwa kemudian melakukan unjuk rasa dan saat sedang melakukan unjuk rasa tersebut Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah kemudian mengambil Asbak yang terbuat dari Kaca dan kemudian melemparkan Asbak tersebut ke lantai dan mengakibatkan Asbak tersebut menjadi pecah, dan lain melakukan hal tersebut Terdakwa, - II. Andi Wiradiansyah kemudian kembali melakukan orasi dengan cara berdiri diatas Kap Mesin mobil yang terparkir di Kantor tersebut sehingga mengakibatkan Kap Mesin mobil tersebut menjadi penyok, dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah juga sempat mendorong badan saksi Zainuddin Mangka, selanjutnya Terdakwa – IV. Andi Ridwan melakukan pengerusakan dengan cara melempar kaca jendela dengan menggunakan batu yang mengaitkan kaca tersebut pecah, sementara itu Terdakwa – V. Basri Bin Yasmin memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu sedangkan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi melempar Kaca Jendela dengan menggunakan batu yang mengakibatkan Kaca tersebut pecah dan mengambil Pot Bunga dan membantingnya dimeja kaca ruang tamu yang mengakibatkan Kaca Meja tersebut pecah ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Asbak yang terbuat dari Kaca, Kaca Jendela, Meja Kaca serta Pot Bunga tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1), Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

.....DAN.....

Khusus untuk Terdakwa – I. Hasri Alias Jack, Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah Bin Alias Dian dan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi ;

DAKWAAN KETIGA

Kesatu:

Bahwa, ia Terdakwa – I. Hasri Alias Jack dan Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah Alias Dian dan Terdakwa – III. Ikhsan Bin

Nazhari Patoppoi bersama-sama dengan Terdakwa –VII. Abd. Hamid Alias Bondang serta Terdakwa –VIII. Armin, pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 14:00 wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jalan Urip Sumihardjo No. 59 Kota Makassar tepatnya diruangan aspirasi dan ruangan komisi A Kantor DPRD Propinsi Sulsel atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, para Terdakwa dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Para Terdakwa bersama dengan beberapa peserta unjuk rasa lainnya pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, melakukan unjuk rasa di Kantor BPN Kota Makassar setelah itu kembali melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata usaha Negara dan terakhir di kantor DPRD Prop. Sulsel yang terletak pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dibawah pimpinan Terdakwa – I. Hasri Alias Jack selaku koordinator lapangan untuk mempertanyakan kasus sengketa tanah antara Amiruddin Pase dengan Willy Ingkriawan dan Suryanti Naim yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.8 No.01 Kota Makassar;
- Bahwa, sesampainya pada tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dan beberapa peserta aksi unjuk rasa lainnya kemudian melakukan pembakaran ban bekas dan melakukan orasi serta meminta kepada saksi Marwah, SE yang merupakan staf Kantor DPRD Prop. Sulsel untuk dipertemukan dengan Anggota Dewan yang berasal dari komisi A dan atas permintaan tersebut, saksi Marwah, SE kemudian mempersilahkan kepada Para Terdakwa dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya untuk masuk kedalam ruangan aspirasi dan tidak berselang lama kemudian Lk. Imbar Ismail yang merupakan salah satu Anggota Dewan Prop. Sulsel datang menemui Para Terdakwa serta beberapa peserta unjuk rasa lainnya sambil memperkenalkan diri selaku tim aspirasi dari komisi B dan mendengar hal tersebut, Terdakwa – I. Hasri Alias Jack tiba-tiba langsung naik kemeja lalu berteriak teriak sambil mencari Anggota Komisi A selanjutnya menuju ke ruangan Komisi A bersama-sama dengan para terdakwa yang lainnya dan di dalam ruangan tersebut, Terdakwa – I. Hasri Alias Jack kemudian naik ke atas meja selanjutnya menendang kursi-kursi, sedangkan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi langsung menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya naik diatas meja dan menarik TV yang berada

diatas meja hingga jatuh, sedangkan Terdakwa – VII. Abd. Hamid Alias Bondang menendang Kursi dan menghamburkannya lalu menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya mematahkan Michropon dan memecahkan papan nama yang berada diruangan Komisi A kemudian melemparkan Kaca Lemari hingga pecah, sementara itu Terdakwa – VIII. Armin yang juga berada diruangan komisi a kemudian melempar kaca lemari hingga pecah sedangkan Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah melempar kursi dan menendang Lemari hingga kacanya pecah dan mengambil Kaca Meja dan membuangnya kelantai hingga pecah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa barang-barang milik kantor DPRD Prop. Sulsel mengalami kerusakan dan mengakibatkan Kantor DPRD Prop. Sulsel mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;

.....ATAU.....

Kedua :

Bahwa, ia Terdakwa – I. Hasri Alias Jack dan Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah Alias Dian dan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi bersama-sama dengan Terdakwa –VII. Abd. Hamid Alias Bondang serta Terdakwa –VIII. Armin, pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 14:00 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jalan Urip Sumihardjo No. 59 Kota Makassar tepatnya diruangan aspirasi dan ruangan komisi A Kantor DPRD Propinsi Sulsel atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, para Terdakwa dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Para Terdakwa bersama dengan beberapa peserta unjuk rasa lainnya pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, melakukan unjuk rasa di Kantor BPN Kota Makassar setelah itu kembali melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata usaha Negara dan terakhir di kantor DPRD Prop. Sulsel yang terletak pada tempat sebagaimana tersebut

diatas, dibawah pimpinan Terdakwa – I. Hasri Alias Jack selaku koordinator lapangan untuk mempertanyakan kasus sengketa tanah antara Amiruddin Pase dengan Willy Ingkriawan dan Suryanti Naim yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.8 No.01 Kota Makassar;

- Bahwa, sesampainya pada tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dan beberapa peserta aksi unjuk rasa lainnya kemudian melakukan pembakaran ban bekas dan melakukan orasi serta meminta kepada saksi Marwah, SE yang merupakan staf Kantor DPRD Prop. Sulsel untuk dipertemukan dengan Anggota Dewan yang berasal dari komisi A dan atas permintaan tersebut, saksi Marwah, SE kemudian mempersilahkan kepada Para Terdakwa dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya untuk masuk kedalam ruangan aspirasi dan tidak berselang lama kemudian Lk. Imbar Ismail yang merupakan salah satu Anggota Dewan Prop. Sulsel datang menemui Para Terdakwa serta beberapa peserta unjuk rasa lainnya sambil memperkenalkan diri selaku tim aspirasi dari komisi B dan mendengar hal tersebut, Terdakwa – I. Hasri Alias Jack tiba-tiba langsung naik kemeja lalu berteriak teriak sambil mencari Anggota Komisi A selanjutnya menuju ke ruangan Komisi A bersama-sama dengan para terdakwa yang lainnya dan di dalam ruangan tersebut, Terdakwa – I. Hasri Alias Jack kemudian naik ke atas meja selanjutnya menendang kursi-kursi, sedangkan Terdakwa – III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi langsung menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya naik diatas meja dan menarik TV yang berada diatas meja hingga jatuh, sedangkan Terdakwa – VII. Abd. Hamid Alias Bondang menendang Kursi dan menghamburkannya lalu menendang Kaca Lemari hingga pecah dan selanjutnya mematahkan Michropon dan memecahkan papan nama yang berada diruangan Komisi A kemudian melemparkan Kaca Lemari hingga pecah, sementara itu Terdakwa – VIII. Armin yang juga berada diruangan komisi a kemudian melempar kaca lemari hingga pecah sedangkan Terdakwa – II. Andi Wiradiansyah melempar kursi dan menendang Lemari hingga kacanya pecah dan mengambil Kaca Meja dan membuangnya kelantai hingga pecah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa barang-barang milik kantor DPRD Prop. Sulsel mengalami kerusakan dan mengakibatkan Kantor DPRD Prop. Sulsel mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHP,JO.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Jaswasi, SH., Muh. Israq Mahmud, S.H., Andi Abd. Gaffar AP, S.H., Anzar Makkuasa, S.H.,M.H.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan didepan persidangan tertanggal 26 November 2012, pada pokoknya mengandung pokok pikiran pembelaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang didengar dalam persidangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing : Saksi “Ahmad Bin Bance”, Saksi “Ayyub Heru Masnawan”, Saksi “Ambo Asse”, Saksi “Bripka Sangkala, SH”, Saksi “Aipda David Dao”, Saksi “Sainuddin Mangka”, Saksi “Hamka”, Saksi “Tajudding”, Saksi “Imran”, Saksi “Anang Tintus”, Saksi “Fither Hattu”, Saksi “Kisman”, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara komulatif alternatif, maka memberi kekuasaan memilih satu diantaranya dakwaan yang diindikasikan terbukti.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka atas diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Hasri Alias Jack, Terdakwa II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa VI. Andi Ridwan, Terdakwa VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa VIII. Armin Alias Munir” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil dan mori terhadap Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar, Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kota Makassar dan Kantor DPRD Tk I Kota Makassar;

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat Kota Makassar;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada ketiga instansi terkait, dan Perbuatan Para Terdakwa pada dasarnya telah dimaafkan oleh instansi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kota Makassar dan Kantor DPRD Tk. I Kota Makassar melalui surat pernyataan maaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan Para Terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurang sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan.

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I. Hasri Alias Jack, Terdakwa II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi,

Terdakwa IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa VI. Andi Ridwan, Terdakwa VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa VIII. Armin Alias Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa - I. Hasri Alias Jack, Terdakwa - II. Andi Wiradiansyah, Terdakwa - III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, Terdakwa - IV. Rahmat Hidayat Amahoru, Terdakwa V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, Terdakwa - VII. Abd. Hamid Alias Bondang , Terdakwa - VIII. Armin Alias Munir tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari, sedangkan Terdakwa - VI. Andi Ridwan selama 1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 potong pot bunga warna hijau yang telah pecah 1 potong pot bunga warna hijau yang telah pecah, 1 buah ban mobil bekas yang telah terbakar, 2 buah kaleng asbak/tempat sampah, 4 bagian pecahan pot yang digunakan untuk melempar kaca, 5 buah serpihan pecahan kaca bening, 5 buah batu, 3 buah pecahan kaca, 3 buah besi jendela, 3 buah karet penahan kaca jendela, 3 buah pecahan kaca lemari warna bening, 4 buah pecahan kaca dinding riben, 3 buah pecahan kaca pintu riben yang dilapisi sticker bening, 2 buah papan nama dari fiber warna coklat gelap dengan tulisan nama warna emas dalam keadaan rusak, 2 buah microphone meja dalam keadaan rusak warna hitam, 1 buah meja kayu warna coklat, 1 buah

pintu lemari warna cream, 1 buah TV merk LG warna silver, dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

3. Komentar Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis yang mengarah pada latar belakang terjadinya kekerasan.

Dari kejadian kekerasan terhadap barang yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku pengrusakan barang agar membuat pelaku tersebut jera dan membuat warga masyarakat lain merasa takut untuk ikut melakukannya. Namun dari segi sosiologi hukum, sekalipun pasal yang menjadi dasar dari putusan hakim adalah pasal yang sama, tetapi bersalah tidaknya terdakwa, berat ringannya vonis hakim masih bergantung pada berbagai faktor yang sifatnya nonhukum yaitu sumber-sumber teori yang di anut oleh hakim, atribut-atribut pribadi hakim, sosialisasi profesional hakim, tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim, tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim, alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan.

Oleh karena itu hakim di sini kita lihat sebagaimana bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan perannya itu ia merupakan pengembang nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat, hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi), sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu. Oleh karena itu, putusan hakim tidak dapat dilihat dari sudut yuridis-formalnya saja, melainkan harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak otonom dan berdasarkan pada berbagai faktor-faktor nonhukum.

Dalam pertimbangan hakim yang dakwaannya di susun secara kumulatif alternatif hakim mengenakan pada dakwaan pertama kesatu, dakwaan kedua kesatu dan dakwaan ketiga kesatu karena dalam pasal ini lah yang mencakup semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan. Adapun pada dakwaan pertama kesatu yaitu 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena agar terpenuhinya suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Terdakwa – I. “Hasri Alias Jack”, Terdakwa – II. “Andi Wiradiansyah”, - III. Terdakwa “Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi”, Terdakwa – IV. “Rahmat Hidayat Amahoru”, Terdakwa – V. “Basri Bin Yasmin Alias Bogel”, Terdakwa – VII. “Abd. Hamid Alias Bondang”, Terdakwa - VIII. “Armin Alias Munir di jatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dan Terdakwa VI. Andi Ridwan dijatuhkan hukuman penjara 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berbeda kepada Terdakwa VI. Andi Ridwan dikarenakan hakim mempertimbangkan bahwa yang meringankan dakwaan terdakwa VI. Andi Ridwan tersebut dikarenakan pada saat persidangan terdakwa harus di rawat di rumah sakit sehingga pada saat ia sembuh dan masuk menjadi tahanan di rutan ia hanya menjalani masa tahanan 1 bulan 8 hari.

Berdasarkan wawancara Hakim Johnny J,H, Simanjuntak pada wawancara 13 Desember 2013 :

Hukuman penjara oleh Para terdakwa semuanya disama ratakan tetapi pada saat persidangan terdakwa VI. Andi Ridwan sakit dan harus dirawat di rumah sakit sehingga masa tahanan yang ia jalani tertunda dan setelah keluar dari rumah sakit langsung menjalani masa tahnannya bersama teman-temannya yang sudah masuk tahanan lebih dulu. Sehingga pada saat Andi Ridwan masuk ia hanya menjalani masa tahanan 1 bulan 8 hari setelah itu Para Terdakwa menjadi tahanan kota.

Berdasarkan tanggapan hakim yang di jelaskan di atas dalam aturan hukum sebenarnya tidak ada yang mengatur apakah terdakwa sakit atau sehat sehingga dakwaan yang di putuskan itu ringan. Apabila ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut maka semua orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat berpura-pura sakit sehingga dakwaan yang di jatuhkan itu lenih ringan tetapi itu semua tergantung oleh pertimbangan hakim yang berwenang memutuskan apakah dakwaan terdakwa tersebut berat atau ringan. Namun dari segi pertimbangan sosiologi hukum, sekalipun pasal yang menjadi dasar putusan hakim adalah pasal yang sama, tetapi bersalah tidaknya terdakwa, berat ringannya vonis hakim, masih

tergantung pada kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Adapun hal yang meringankan dakwaan para Terdakwa ialah terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, dan instansi tersebut telah mencabut laporannya serta memaafkan perbuatan para terdakwa.

Selanjutnya hasil wawancara oleh Hakim Johny J,H, Simanjuntak pada wawancara beliau mengatakan :

Para Terdakwa juga telah meminta maaf kepada ketiga instansi terkait, dan hal yang meringankan Para Terdakwa dari kasus ini ialah pihak instansi tersebut melayangkan surat yang isinya semua tindakan terdakwa di maafkan serta mencabut laporannya dan menginginkan majelis hakim untuk memperingan dakwaan terdakwa. Dan Para Terdakwa juga mahasiswa yang kritis tetapi cara penyampaian itu yang berlebihan.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Mks, bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa. Dari perbuatannya tersebut tindak pidana yang dikenakan hukuman penjara merupakan efek jera dari perbuatannya itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Makassar dalam Putusan Nomor 1133/Pid.B/2012/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa I. Hasri Alias Jack, terdakwa II. Andi Wiradiansyah, terdakwa III. Ikhsan Bin Nazhari Patoppoi, terdakwa IV. Rahmat Hidayat Amahoru, terdakwa V. Basri Bin Yasmin Alias Bogel, terdakwa VI. Andi Ridwan, terdakwa VII. Abd. Hamid Alias Bondang , terdakwa VIII. Armin Alias Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan sanksi pidana dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dan terdakwa VI. Andi Ridwan menjalani pidana penjara 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari dan membayar perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
2. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, sehingga

dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan para terdakwa mengakibatkan Kantor BPN Kota Makassar, Kantor PT. TUN Kota Makassar, dan Kantor DPRD Prov. Sulsel mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian dan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam aksi unjuk rasa sebaiknya para pengunjung rasa dilakukan secara tertib, santun dan memperhatikan etika atau moral sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dalam Undang-undang No. 9 tahun 1989 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum sehingga tujuan dari aksi unjuk rasa berupa penyampaian nasehat, aspirasi dan sebagainya dapat tersalurkan dan lebih mudah diterima.
2. Dalam melakukan suatu perbuatan hendaknya kita dapat berpikir dampak dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
3. Dalam melakukan aksi unjuk rasa sebaiknya masyarakat melihat pokok permasalahan yang terjadi sehingga masyarakat tidak melakukan hal-hal diluar dari maksud dan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan prinst, 2005. *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi. 1986 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Lamintang, P.A.F.; 1997. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Surabaya.

Marpaung,Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso,Thomas.2002.*Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia, Jakarta.

Susan.Novri.2008. *Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik kontemporer*. Kencana Prenada Media, Surabaya.

Soesilo, R, 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor.

Soekanto, Soerjono.1996. *Fungsi hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.

Syarbaini, Syahrial. 2004. *Sosiologi dan Politik*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesi, Bogor.

Tongat, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Umm Press, Malang.

Wahjono, Padmo. 1984. *Beberapa Masalah Ketata Negara Di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta .

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 68 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

C. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa di akses 2 oktober 2013 13:02 Wita

<http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/01/tentang-anarkisme-bagian-i-apa-itu.html> Akses tgl 4 okt 2012

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html> diakses 23 okt 2013 14:00 Wita